

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor:900/ Pid.B/2013/PN.Mks)



ANDI BASO ZULFAKAR AR

B111 10 153

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks)

Oleh:

ANDI BASO ZULFAKAR AR

B 111 10 153

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

BAGIAN PIDANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor: 900/Pid.B/2013/PN.Mks)

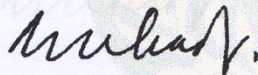
Disusun dan diajukan oleh

**ANDI BASO ZULFAKAR AR
B 111 10 153**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Pada Hari Jumat 21 Februari 2014
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

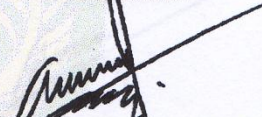
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19830419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Andi Baso Zulfakar AR
No. Pokok : B 111 10 153
Program : Hukum Pidana
Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
MENYEBABKAN KEMATIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus
Putusan Nomor: 900 / Pid.B / 2013 / PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

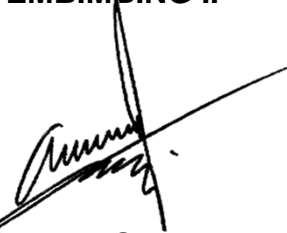
Makassar, 7 Februari 2014

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

PEMBIMBING II



Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI BASO ZULFAKAR AR.**
No. Pokok : B111 10 153
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian yang Dilakukan oleh Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor :900/Pid.B/2013/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2014

a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik.

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Andi Baso Zulfakar AR (B 111 10 153), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak* (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks), ("Dibimbing" oleh **Muhadar**, sebagai pembimbing I dan **Amir Ilyas**, sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Nomor Putusan: 900 / Pid.B / 2013 / PN.Mks).

Penelitian dilakukan di kota makassar, yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar, alasan penentuan tempat tersebut adalah untuk mencari data yang diperlukan sebagai bahan analisis, dan data tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perkara yang meliputi berita acara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan pidana materil terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) dan Majelis Hakim, namun dalam menentukan penjatuhan pidana JPU dan Hakim tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks sesuai dengan pasal yang didakwakan, tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Dengan Pidana Penjara 4 (empat) bulan tetapi tidak perlu dijalankan selama terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 bulan, menurut penulis tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 22/2009 dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3/1997 dan menurut penulis pidana tersebut sebaiknya tetap dijalani, karena masa penjara yang diberikan dapat mendidik anak agar lebih berhati-hati agar perbuatan serupa tidak diulangnya kembali. Saran penulis yaitu: 1. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah. 2. Peran para aparat penegak hukum yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:900/ Pid.B/ 2013/PN.Mks)".

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. dan Ibundaku Andi Fatmawati, S.H., M.H. atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.

Kepada Kakakku Andi Bau Inggit AR, S.H., Adikku Andi Bau Susilowati AR, dan Andi Bau Medlin AR. dan seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor dan seluruh Stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan dan seluruh Stafnya.

3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,MH.,Ibu Haeranah, S.H.,M.H. dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penguji.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
6. Teman-teman Anggota KKN Reguler Gelombang 85, Kelurahan Larompong, KorcamNur Hidayat Nurdin, Sekcam Melva Mulandari Komuna, Bencam Charry Pujiani, Sekkel Hamzah Hafid, Benkel Reski Tappangan, Nur Pratiwi, dan teman-teman LainnyaSerta Bapak Camat Larompong, Bapak Lurah Larompong, Bapak Kepala Dusun Larompong A. Faisal Adam dan sekeluarga terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama Kuliah Kerja Nyata.
7. Sahabat-sahabatku, Ridwan, Fakhriawan, Sidik, Ardiansyah, Saddam, Jaelani, Kiprah, Cesar, Salam,Awal,Zaldi, Edsy, Ali,Daus, Imam, Fakhri, Tim, Gagat, Indra,Maulana yang selama ini telah menjadi sahabat yang baik dan mengajarkan sebuah persahabatan serta selalu bersama penulis baik suka maupun duka.
8. Teman-teman Seperjuangan SMP Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar Khususnya Angkatan 2004-2010 FOZ (Four One Zero). Terima kasih atas dukungan dan doanya kepada penulis selama menyusun skripsi.
9. Teman-teman Seperjuangan SMA 21 Khususnya IPA 2 Terima kasih atas dukungan dan doanya kepada penulis selama menyusun skripsi
10. Teman-temanku Yoga, Taufik, Ardianto, Khaerul, Munawir, Amrul, Ari, Ammar, Bro, Aat, Jayanti, Susan Ridwan, Rahman Amir, Imam,Said, Pandi, Andri, Kikin, Ilo, Saipul, Asrul, Nuni, Pujia, Dija, Herman, Rani, ardi, Salim, Ade, Fajrin, Olling, Fadly, Dody, Yosep Dll. Terima kasih atas dukungan dan doanya kepada penulis selama menyusun skripsi.
11. Keluarga Besar PERBAKIN UNHAS atas segala Pelajaran, Pengalaman dan rasa kekeluargaan yang telah dibagi kepada penulis sehingga menjadi sebuah Motivasi tersendiri bagi penulis.

12. Para Guru Spiritual, Bapak Rauf, Puang Sultan, Eyang Effendy Serta Pelatih ML 151 Terimah Kasih yg tak terhingga kepada yang telah memberikan Support yang begitu besar Kepada Penulis.
13. Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2010 yang tergabung dalam "LEGITIMASI 2010".

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Makassar, 3 Februari 2014

Andi Baso Zulfakar AR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	7
3. Unsur-unsur.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	19
1. Pengertian Lalu Lintas	19
2. Pelanggaran Lalu Lintas	20
D. Tinjauan Umum Mengenai Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Pengertian Kenakalan Anak	23
E. Teori dan Tujuan Pemidanaan	26
1. Teori Pemidanaan	26
2. Tujuan Pemidanaan.....	28

F. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak.....	29
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Dan Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks).....	41
1. Posisi Kasus	41
2. Surat Dakwaan	42
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	45
4. Analisis Penulis.....	46
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaian nya Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks).....	53
1. Intisari Putusan.....	54
2. Proses Persidangan	59
3. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu “suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat” (Yulies Tiena Masriani, 2006:28), sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu “seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya”.

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk

menjalankan ketertiban hukum. Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada akibatnya yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini anak yang masih dibawah umur, dan sebagainya.

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat bahkan sudah membudaya, sehingga setiap dilakuakn operasi tertib lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Polantas), pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas, apalagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 sebagai pengganti

Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur terus menghiasi peristiwa dijalanan. Peristiwa teranyar adalah kasus kecelakaan yang melibatkan AQJ alias Dul (13), putra bungsu musisi Ahmad Dhani di Jalan Tol Jagorawi, pekan silam yang menewaskan 7 orang. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur

harus menjadi pelajaran semua pihak, tak terkecuali para pemangku kepentingan termasuk Polri, khususnya Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.

Hal yang sama juga terjadi di kota makassar yakni kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak sebagaimana dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/PN.Mks), dimana seharusnya seorang anak tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan umur dari si anak belum mencukupi. Disini dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas belum bisa teratasi dengan baik dikarenakan kurang wawasan berlalu lintas dan pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir penyelesaian studi penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks)?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas

menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak(Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks)?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 900 / Pid.B / 2013 / PN.Mks)

D. Manfaat Penulisan

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran/masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtrdingen*). Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran (Amir Ilyas,2012:29)

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang melanggar hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a) **Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman

pidana penjara. Pelanggaran dan kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

b) **Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

c) **berdasarkan bentuk kesalahan**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- d) **berdasarkan macam perbuatannya**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.
- e) **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f) **Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindakan pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku ii & buku iii). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g) **Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

- h) **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i) **Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang iringankan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diringankan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau fsktor diringankannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap tindak pidana bentuk yang diperberat atau yang diringankan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j) **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi pada suatu peraturan perundang-undangan.

k) **Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan**, dibedakan dengan tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikianrupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikianrupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, diisyaratkan secara berulang. (Amir Ilyas, 2012:28-34)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP maka dapat diketahui adanya 2 unsur tindak pidana (P.A.F. Lamintang, 1997:193-194), yaitu:

a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu:

1. Mencocoki rumusan delik
2. Melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:

1. Adanya kesalahan terdiri dari dolus dan culpa
2. Dapat dipertanggungjawabkan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Selain itu dalam (Adami Chazawi, 2002: 79) unsur tindak pidana setidak-tidaknya dibagi menjadi 2 sudut pandang, yakni:

1. Dari sudut pandang Teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2. Dari sudut undang-undang

Dari sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal perundang-undangan yang ada.

Menurut menurut Moeljatno(Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman Pidana (yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002 : 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orangnya.

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat akibat hukum yang disyaratkan.

Perlu diingat kembali perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana :

“Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidanya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan.”

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

- 1) Mampu bertanggung jawab
- 2) Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf

Adadua aliran yang selama ini dianut, yaitu : (Sudarto, 1990, Hukum Pidana I):

1. Kaum indeterminis (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada

kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal).

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

2. Kesengajaan (dolus) & Kealpaan (culpa)

- a. Kesengajaan (dolus) Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.
- Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

b. Kealpaan (culpa)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh

hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja). Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

- Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan *merlijke schuld* atau *grote schuld*, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan", seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP.

- Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP.

3. Alasan penghapus pidana

Terdapat 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

- a) alasan pembenar,
- b) alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

C. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sebagaimana menurut W.J.S Poerwadarminta (1984:555) bahwa pengertian lalu lintas adalah sebagai berikut :

“lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya)”.

Namun pengertian lalu lintas dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 butir 2 yakni lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntuhkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Adapun Ramdlon Naning mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas adalah apa yang diatur dalam pasal 105 Undang-undang No 22 tahun 2009 yaitu:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berprilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta berhak mendapatkan kebebasan.

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.

Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:7) “pengertian anak dari segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum”.

Lebih lanjut Maulana Hasan Wadong (2003:3) mengemukakan bahwa

“anak diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur”.

Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

1. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Undang-undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4. Undang-undang No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
5. Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
6. Undang-undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 171 bahwa batasan umur

anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) KUHP).

7. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur dibawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan pasal 45, pasal 46, pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah Juvenile delinquency, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Istilah Juvenile delinquency, berasal dari juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja ; sedangkan delinquency artinya wrong doing, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,a-sosial,liminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau,

penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Nashriana,2011:25).

Istilah kenakalan nakal ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang peradilan bagi anak dinegara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Menurut Kartini Kartono (Wagiat Soetojo,2006:9) bahwa yang dimaksud dengan Juvenile delinquency adalah: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Adapun Paul Moedigno (Romli Atmasasmita,1983:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian juvenile deliquancy, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan deliquancy. Jadi semua

tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you cansy dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Romli Atmasasmita (1983:40) memberikan pula perumusan juvenile delinquency, yaitu sebagai berikut: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah:

- 1. Anak yang melakukan tindak pidana;
- 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak menunjukkan bahwa juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan.

E. Teori Dan Tujuan Pidanaan

1. Teori pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam empat golongan teori, yakni ;

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*).

Teori ini membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidanaan bagi terpidana.

2. Teori Relatieve (*Nisbi*) atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

3. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).

Teori ini mendasarkan pembedaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.

4. Teori Negatif (*Negativisme*).

Teori ini dipelopori oleh Hazelwink-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk membedakan pada makhluk-mahluknya.

George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu yang penting tetapi lebih dari itu karena di sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis.

Teori Tujuan pembedaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Teori-teori tujuan pembedaan tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering di gunakan dalam mengkaji tentang tujuan pembedaan yaitu:

1. Teori Retributif (absolute)
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)
3. Teori integrative (gabungan)

2. Tujuan Pemidanaan

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni :

1. Pandangan Retributif (*Retributive View*)

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnyamasing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

2. Pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka

mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

F. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak

Dalam pasal 306 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam pasal 316 (1) Undang-undang No.22 tahun 2009 yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Adapun ketentuan yang dikategorikan sebagai Kejahatan diatur dalam Pasal 316 ayat (2) Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

(2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.

Namun berikut ini hanya dipaparkan beberapa ketentuan yang langsung berhubungan dengan kasus yang diteliti, adapun ketentuan tersebut antara lain:

Pasal 281 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1.000.000.

Pasal 282 adalah :

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 283 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000.,

Pasal 285 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalam alur ban sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalam alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 5Rp 500.000.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.
4. Setip orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana di maksud dalam pasal 59,pasal 106 ayat (4) huruf f,atau pasal 134 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atu denda paling banyak Rp250.000.
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal

115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Pasal 288 adalah:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 290 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan dan penumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 291 adalah :

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 293 adalah:

- (1) Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu

sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000,00.

Pasal 294 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 112 ayat (1) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 295 adalah :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Pasal 297 adalah:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00.

Pasal 310 adalah:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak saat ini yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan-ketentuan tentang anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
 - a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 4 adalah

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 8 adalah

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
- (6) Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 22 adalah

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23 adalah

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 adalah

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;

- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25 adalah

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26 adalah

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27 adalah

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28 adalah

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- (3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas pertimbangan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari aspek hukum.

Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembelaan dari seorang terdakwa
2. Dakwaan jaksa penuntut umum
3. Alat bukti yang terbukti di persidangan
4. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum
5. Ada tidaknya alasan penghapus pidana
6. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa
7. Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa
8. Alasan sosiologis bagi terdakwa

Dari beberapa hal di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan, selain itu perbuatan yang melawan hukum menurut hukum pidana (andi zainal abidin, 1984: 48), dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana (Moeljatno, 1983:23-24).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kota makassar, yang berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar, alasan penentuan tempat tersebut adalah untuk mencari data yang diperlukan sebagai bahan analisis, dan data tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perkara yang meliputi berita acara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

B. Jenis dan sumber data

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan proposal ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam Skripsi ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah –makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti turun langsung ke lapangan (pengadilan negeri makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan perumusan delik dan alasan yang meringankan pidana, maka diajukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini.
2. Study dokumentasi, mempelajari berkas perkara seperti berita acara penuntutan, penyitaan dan putusan hakim.

D. Analisis

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder di analisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B / 2013 / PN.Mks)

1. Posisi Kasus

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari minggu pagi tanggal 14 oktober 2012 sekira pukul 07.30 wita di jalan Todoppuli Raya timur dekat Country Billiard makassar, dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4410 AB dengan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3660 XV.

Pengendara sepeda motor Yamaha Vega bernama saudari ANDI TENRI AJENG Bin A. Azis, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio bernama saudara H.GUNAWAN S,ST Bin SUWARSO membonceng istrinya yang bernama saudari Hj. NURSAIDA (korban).

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi disebabkan karena saudari ANDI TENRI AJENG Bin A. Azis pada saat akan mendahului ia tidak memperhatikan kendaraan/sepeda motor yang ada di depannya yang bergerak searah (utara ke selatan) sehingga terjadi tabrakan.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap boncengan sepeda motor Yamaha Mio (saudari Hj. NURSAIDAH) tidak sadarkan diri sejak mengalami kecelakaan lalu lintas hingga meninggal dunia pada hari itu

juga minggu tanggal 14 oktober 2012 di Rumah Sakit Grestelina Makassar.

2. Surat Dakwaan

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ANDI TENRI Bin A. Azis pada hari minggu tanggal 14 oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan oktober 2012, bertempat di jalan Toddopuli Raya Timur Dekat Country Billiard Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri makassar, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Lk. H.GUNAWAN S. dari rumahnya berboncengan dengan istrinya korban Hj. NURSAIDAH di BTN Minasa Upa dengan tujuan Pasar Toddopuli menggunakan sepeda motor dan setelah dari Pasar Todopulli Lk. H.GUNAWAN S. bermaksud pulang kerumahnya namun pada saat pulang berboncengan dengan istri Hj. NURSAIDA di jalan Todoppuli Raya Timur tiba-tiba datang terdakwa mengendarai sepeda motor yang ingin mendahului sepeda motor saksi GUNAWAN yang berada didepan terdakwa dan dari arah belakang terdakwa menabrak sepeda motor saksi Lk. H. GUNAWAN S. bagian sebelah kanan (kaca spion kanan) sehingga sepeda motor saksi GUNAWAN S. terjatuh kekanan sedangkan istri saksi yakni saudari Hj. NURSAIDAH

(korban) saksi Lk. H. GUNAWAN tidak tahu nanti setelah terbaring di aspal baru saksi mengangkat istrinya tersebut, saksi GUNAWAN mengalami luka pada siku kiri dan siku kanan mengalami lecet, sedangkan boncengan saksi (istri saksi) kepala bagian belakang luka pada bagian otak belakang dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa lawan tabrakan saksi GUNAWAN, saksi GUNAWAN tidak perhatikan namun pada saat saksi GUNAWAN melihat terdakwa mengangkat sepeda motornya, dan setelah saksi mengangkat istri saksi dibantu oleh warga yang ada di tempat kejadian kemudian saksi GUNAWAN bawa ke mobil Mikrolet dan selanjutnya menuju ke Rumah Sakit Grestelina Makassar.

- Bahwa posisi saksi H.Gunawan saat kejadian terjatuh kekanan bersama sepeda motor sedangkan boncengan saksi Hj. NURSAIDA (korban) luka pada bagian kepala dan keluar darah dari telinga serta sempat muntah dua kali menurut dokter otak kecil Hj NURSAIDA (korban) retak dan pendarahan otak kecil, sempat di rawat selama kurang lebih 5 (lima) jam selanjutnya meninggal dunia.
- Bahwa Hj.NURSAIDA (korban) di dikeluarkan dari Rumah Sakit Grestelina pada hari itu juga sekira jam 18.30 wita selanjutnya dibawa pulang ke rumah korban di BTN Minasa Upa Makassar, dan di makam kan setelah esok harinya, hari senin tanggal 15 oktober sekira jam 15.35 wita di pemakaman di Labukang Kec. Bajukiki Kota madya Parepare.

- Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akte kelahiran dari pencatatan sipil Kota Makassar menerangkan bahwa terdakwa yang bernama ANDI TENRI AJENG BIN A. AZIS Terlahir pada tanggal 16 mei 1998 dan berumur 15 tahun pada saat sekarang dan pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.127/ VER/ RSG / XII / 2012 dari rumah sakit Grestelina Makassar Tanggal 14 oktober 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr.Deborah matulatan, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar akibat kecelakaan lalu lintas; pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada telinga kanan tampak mengalir darah segar kurang lebih 50 cc;
 - b. Pada rongga mulut tampak mengalir darah segar 100 cc;
 - c. Tampak memar kebiruan dibawah kelopak mata kanan;
 - d. Tampak memar ukuran 5 sntimeter kali empat sentimeter pada bagian kanan belakang kepala;

Kesimpulan;

- Pengeluaran darah segar dari telinga kanan dan rongga mulut memar kebiruan dibawah kelopak mata kanan serta memar dibagian belakang kanan kepala akibat benturan keras pada kepala;

- Korban meninggal dunia pada tanggal 14 oktober 2012 di makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 31 mei 2013 Nomor : B-797/R.4.10/Ep.1/05/2013, terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- Tungal : Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Thun 2009.

Sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan.

Fakta–fakta yang terungkap dalam pemeriksan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Pr.ANDI TENRI AJENG Bin A.Azis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pr. ANDI TENRI AJENG Bin A.Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. menyatakan barang bukti berupa:(1) unit sepeda motor Yamaha vega NO.Pol.DD-4410-AB, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega NO.Pol.DD-4410-AB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. DD 3660VX, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3660VX,1 (satu) SIM golongan C An. H.GUNAWAN, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini senin tanggal 19 agustus 2013.

4. Analisis Penulis

Melihat posisi kasus tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yang membuat surat

dakwaan terhadap terdakwa bukan berdasarkan pada Ketentuan KUHP melainkan dengan memberikan dakwaan dengan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 sudah tepat mengingat ilmu hukum mengenal adanya asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus diutamakan dari peraturan yang umum sifatnya (*lex specialis derogat lex generalis*), dalam artian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 (*lex specialis*) mengenyampingkan KUHPidana (*lex generalis*).

Berdasarkan data yang penulis dapatkan penulis menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa dalam perkara ini ada 3 hal yakni:

1. Dalam mengendarai sepeda motor tersangka tidak memiliki SIM. Karena usianya yang masih 14 tahun (belum cukup umur).
2. Dalam mengemudi kendaraan bermotor dan ingin melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur sebelah kanan yang akan dilewati dan pengendara mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup, namun dalam hal ini tersangka tidak memperhatikan hal tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Karena kelalaiannya itu menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sdri. Andi Tenri Ajeng melanggar Pasal-Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang

dikemudikan. Dalam hal ini Andi Tenri seharusnya memiliki SIM C sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang digunakan yaitu sepeda motor, namun karena Andi Tenri masih berusia 14 tahun, maka dia dikategorikan sebagai anak sebagaimana dalam UU perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan. Oleh karena itu seharusnya Andi Tenri belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, apalagi di jalan raya.

2. Ketentuan Pidana pada Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam hal ini berarti Andi Tenri seharusnya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya andi tenri sama sekali tidak di tahan.
3. Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri mengakui bahwa tersangka tidak

memperhatikan jarak yang ada pada saat akan mendahului sepeda motor yang ada di depannya sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.

4. Selanjutnya Pasal 310 ayat (4) undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”. Segala unsur yang terdapat dalam Pasal ini telah terpenuhi sebagai mana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor: dalam Pasal ini yang dimaksud adalah orang yang menjalankan atau memegang kemudi/kendali pada kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini Andi Tenri(terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan H. Gunawan (korban) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio;
- b. Yang karena kelalaiannya: sdri Andi Tenri Ajeng saat mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh H. Gunawan yang berada di depannya, kaca spion sebelah kiri sepeda motor terdakwa bersenggolan dengan kaca spion sebelah kanan sepeda motor yang ada di depannya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan menyebabkan boncengannya mengalami luka pada bagian kepala.

- c. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia: kecelakaan lalu lintas terjadi karena pada saat Andi Tenri Ajeng mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh H. Gunawan yang berada di depannya, kaca spion sebelah kiri sepeda motor terdakwa bersenggolan dengan kaca spion sebelah kanan sepeda motor yang ada di depannya sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan menyebabkan boncengannya mengalami luka pada bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit Grestelina Makassar dan pada sore hari boncengan sepeda motor lawan tabrakan Andi Tenri Ajeng meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti, maka terdakwa terbukti memenuhi segala unsur dalam ketentuan Pasal ini. Dengan demikian jelas hal inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ini.

Namun perlu diperhatikan bahwa yang menjadi terdakwa adalah seseorang yang masih berusia 14 Tahun, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan ini yang di maksud anak nakal adalah **a. anak yang melakukan tindak pidana**; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tentu anak nakal yang dimaksud adalah anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Selain dari pada itu dalam Pasal 22 UU Pengadilan anak juga menegaskan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Dalam Pasal 23 lebih lanjut menentukan bahwa :

- (1) "Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Dengan demikian jelas bahwa selain UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jaksa Penuntut Umum juga seharusnya memperhatikan UU Pengadilan anak dalam memberikan tuntutan kepada terdakwa. Namun pada Perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan

Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Penulis dakwaan jaksa sudah tepat, tetapi seharusnya diperhatikan pula ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) ditentukan bahwa *“Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24”*. Dan Pasal 26 ayat (1) berbunyi *“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga dengan demikian ancaman pidana penjara terhadap sdri Andi Tenri Ajeng Binti Andi Aziz paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian hal ini tentu berpengaruh pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni seharusnya selain menyatakan terdakwa Sdri. Andi Tenri Ajeng Binti Andi Aziz, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, juga menjatuhkan pidana terhadap sdri. Andi Tenri Ajeng Binti Andi Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4410-AB, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4410-AB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3660 VX, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3660 VX, 1(satu) SIM Golongan C An. H. Gunawan, dikembalikan kepada yang berhak. Dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks)

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk

mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang.

Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Intisari Putusan

Pada kasus Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks rumusan intisari putusannya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Putusan

Dalam putusan ini tercantum kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan kepala putusan yang

demikian dimaksudkan agar hakim tidak boleh main-main, hakim harus jujur dan adil karena putusan yang dibuat dengan mengatasnamakan Tuhan mengandung tanggung jawab yang berat dalam menjalankan tugasnyatersebut, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan YME.

- b. Identitas Terdakwa (Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa)

Pemeriksaan Identitas terdakwa dilakukan setelah sidang dibuka oleh hakim. Adapun identitas terdakwa yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Nomor Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : ANDI TENRI AJENG Binti ANDI AZIS;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun/ 16 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Borong Raya No. 85 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Pemeriksaan terdakwa tersebut telah memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam sidang pada

hari itu adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara yang akan diperiksa.

c. Dakwaan.

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan Dakwaan Tunggal, yakni : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Karena dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum adalah dakwaan tunggal, maka hakim harus membuktikan semua unsur dari masing-masing dakwaan.

d. Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dari Keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lainnya dengan terbukti seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum

e. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman.

- a) Bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembenar, dimana menurut pengamatan hakim tunggal, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu

Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

b) Bahwa pembedaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana;

c) Bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti di bawah ini;

Hal-Hal yang Memberatkan;

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Hal-Hal yang Meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa memberikan uang duka kepada keluarga korban

f. Putusan

Bahwa proses persidangan yang memeriksa anak sebagai terdakwa harus tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan. Putusan hakim dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap hasil pemeriksaan perkara sehingga tidak ada penduga-dugaan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak.

Putusan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar
Perkara Nomor (Studi Kasus Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/
PN.Mks) sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tenri Binti A. Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ternyata ada perintah Hakim karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8(delapan) bulan;
4. Memerintahkan supaya barang buki berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. DD 4410-AB;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha V ega No. Pol. DD 4410-AB;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3660 VX;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3660 VX;
 - 1(satu) SIM Golongan C An. H. Gunawan.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Proses Persidangan

Dalam proses persidangan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks sudah sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kesesuaian itu terdiri :

- a. Adanya laporan pembimbing kemasyarakatan.

Laporan pembimbing kemasyarakatan dengan nomor register Lit.Polrestabes.Mks./29/X/2012-05 Laporan ini berguna untuk memberikan gambaran keadaan diri, keadaan keluarga dan keadaan lingkungan sosial terdakwa. Apakah perilaku terdakwa yang menyimpang dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Laporan pembimbing kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan. pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan ketentuan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan sehingga konsekuensi yang timbul jika laporan itu tidak dipertimbangkan adalah putusan batal demi hukum.

- b. Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyebutkan bahwa setiap anak nakal berhak

mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum. Anak memiliki keterbatasan pengetahuan khususnya mengenai hukum sehingga keberadaan penasehat hukum sangat penting agar segala proses yang dijalankan dalam penyelesaian kasusnya tidak melanggar hak-hak anak tersebut. Dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks, terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa hanya di dampingi oleh orang tua terdakwa.

c. Tidak diperiksa oleh hakim majelis.

Untuk pengadilan anak, hakim yang memeriksa adalah hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dapat memakai hakim majelis (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah apabila ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya.

Dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks diperiksa oleh hakim tunggal itu sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari segi pembuktian pun tidak sulit karena alat bukti lengkap dan terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya. Menurut penulis pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim anak sudah

sesuai dengan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- d. Hakim tidak memakai toga saat sidang anak berlangsung .

Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada sidang anak. Dalam perkara Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks hakim tidak mengenakan toga saat sidang anak.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum tetapi akan menciptakan suasana yang menyramkan bagi anak sehingga melanggar hak-hak anak.

3. Analisis Penulis

Putusan hakim dapat berupa sanksi hukum atau bebas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan sanksi hukum dapat berupa pidana atau tindakan. Pada kasus Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ternyata ada perintah Hakim

karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8(delapan) bulan.

Menurut penulis putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena ancaman maksimal untuk anak adalah separuh dari maksimum pidana untuk orang dewasa. Pada Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman pidananya maksimal 6 (enam) tahun. Ini berarti ancaman pidana maksimal untuk anak adalah 3 (tiga) tahun.

Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim menurut penulis tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, selain itu tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana telah dipaparkan dalam pertimbangan hakim di atas, oleh karena itu menurut hemat penulis seharusnya masa pidana penjara yang dijatuhkan hakim maksimal 3 tahun, dalam hal putusan hakim yakni 4 bulan jelas boleh saja, namun menurut penulis pidana tersebut sebaiknya tetap dijalani, karena masa penjara yang diberikan dapat mendidik anak agar lebih berhati-hati agar perbuatan serupa tidak diulanginya kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan pidana materil terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat di gunakan oleh majelis hakim, namun dalam menentukan penjatuhan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 900/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks sesuai dengan pasal yang didakwakan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Dengan Pidana Penjara 4 (empat) bulan tetapi tidak perlu dijalankan selama terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 bulan, menurut penulis tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 dan menurut penulis pidana tersebut

sebaiknya tetap dijalani, karena masa penjara yang diberikan dapat mendidik anak agar lebih berhati-hati agar perbuatan serupa tidak diulanginya kembali.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kelalaian / kealpaan dalam berlalu lintas melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan..
2. Peran para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Serta para penegak hukum seharusnya dapat lebih memahami isi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses persidangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi, 2002 pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana), Bagian 1, Jakarta PT.Rja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education : Yogyakarta.
- Maulana Hasan Wadong,2000. Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Gramedia Indonesia).
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bandung: Bina Aksara.
- Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres).
- P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984).
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, (Bandung:Armico, 1983).
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung:Refika Aditama, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 29 Januari 2014

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/276/HKM/I/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

RAMLI DJALIL, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: ANDI BASO ZULFAKAR AR
No.Pokok	: B111 10 153
Program studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Alamat	: Komp. Perdos Unhas Tamalanrea Blok.BG/24 Makassar
Judul Skripsi	: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 900/Pid.B/ 2013/PN.MKS)".

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak 23 Januari 2014 sampai dengan 29 Januari 2014, dan telah dibimbing oleh :

1. Frangki Tambuwun, SH.,MH

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tanggal 15 Januari 2014 dengan Nomor: 766/ UN4.6.3/PL.02/2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



RAMLI DJALIL, SH.MH
NIP. 4962123119910310045